

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN REMAJA PUTUS SEKOLAH PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI 2 DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Alif Faadhil Sya'bana¹, Andi Ismail Lukman²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan remaja putus sekolah pada tingkat SMA di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri 2 Kota Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan utama dalam penelitian ini adalah warga belajar SKB yang pernah mengalami putus sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab putus sekolah terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rasa malas, rendahnya motivasi belajar, dan permasalahan pribadi seperti pelanggaran tata tertib sekolah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, orang tua yang sakit atau memiliki pekerjaan berpindah-pindah, serta perlakuan tidak adil dari lingkungan sekolah, seperti diskriminasi dan bullying. Meskipun demikian, seluruh informan memiliki pandangan bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan.

Temuan ini dianalisis dengan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, yang menjelaskan bahwa putus sekolah merupakan bentuk disfungsi dari lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam aspek adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai (AGIL). Oleh karena itu, penanganan masalah putus sekolah perlu melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta sistem pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua kalangan.

Kata Kunci: Putus Sekolah, Remaja, Pendidikan Kesetaraan. SKB

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: m.alif.fs0734@gmail.com

² Dosen Pembimbing Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar lalu diperuntukkan kepada seluruh manusia yang sifatnya universal dan juga dapat dilakukan dimana saja, kapanpun, dan tidak dibatasi oleh waktu. Pendidikan mempunyai peranan yang vital dalam proses kemajuan negara. Bidang pendidikan mendapat perhatian banyak dari pemerintah dalam hal meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang nantinya berfokus pada perkembangan sumber daya manusia.

Menurut Hasbullah (dalam Fatmawati, 2019) Pendidikan memiliki peranan penting didalam kehidupan manusia yang menyebabkan mampu berinteraksi dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Manusia membutuhkan pendidikan, karena pendidikan sebagai upaya manusia dalam membina kepribadiannya berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat serta kebudayaannya. Setiap manusia berhak mendapatkan hak pendidikannya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Nomor 1 yang menyebutkan Hak dan Kewajiban Negara bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Fungsi, tujuan serta hak untuk memperoleh Pendidikan bermutu tersebut telah mencakup semua perkembangan dan pertumbuhan yang harus dilakukan setiap manusia, dikarenakan setiap manusia membutuhkan pendidikan untuk pembentukan dirinya. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan adalah sebuah aset yang berharga untuk anak bangsa yang sungguh-sungguh mau serta peduli terhadap pentingnya pendidikan, karena dengan adanya pendidikan kita dapat mengatasi kebodohan serta kemiskinan yang ada di negara kita (Mesra, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Pasal 2 berbunyi bahwa Pendidikan berfungsi sebagai suatu wadah perkembangan kemampuan dan juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik tersebut agar menjadi manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab.

Sejak tahun 2015, Indonesia telah melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar selama 12 tahun yang mana selama 12 tahun tersebut terdiri dari 6 tahun pada jenjang dasar atau SD, lalu pada jenjang SMP selama 3 tahun dan pada jenjang SMA selama 3 tahun yang dimana tujuan dari program wajib belajar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa. Namun disamping itu, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan program paket A, paket B, dan juga paket C, yang memberikan pelayanan kepada anak-anak usia sekolah untuk memasuki sekolah dengan murah dan juga terjangkau.

Kasus putus sekolah bukan merupakan suatu hal yang baru di dalam sejarah pendidikan, putus sekolah adalah suatu kondisi yang dimana peserta didik tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya sebelum waktunya atau tidak tamat menyelesaikan program belajarnya. Putus sekolah tak hanya berdampak kepada individu yang mengalami, akan tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap masyarakat dan negara. Peserta didik yang putus sekolah cenderung mengalami kendala dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan angka pengangguran yang meningkat dan ketimpangan sosial. Remaja bisa mengalami putus sekolah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor finansial, faktor kondisi keluarga, faktor lingkungan pertemanannya hingga permasalahan pribadi. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat remaja menjadi putus sekolah seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam faktor finansial contohnya seperti ketidakmampuan ekonomi dalam membayar biaya sekolah atau SPP. Lalu contoh pada permasalahan pribadinya seperti malas untuk pergi ke sekolah dikarenakan tidak percaya diri sehingga tidak pandai bersosialisasi dalam lingkungan persekolahannya. Adapun faktor karena lingkungan temannya ialah adanya pengaruh dari teman mengajak untuk bolos dari sekolahnya hingga menjadi sering bolos dari sekolah sampai akhirnya menjadi tidak naik kelas hingga prestasi peserta didik tersebut menjadi menurun.

Kasus putus sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan Pendidikan yang tidak pernah berakhir. Kasus ini telah menjadi tantangan serius terhadap pemerintahan Kota Samarinda. Seperti yang diketahui Kota Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur sedang menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan, dikutip dari artikel BeritaKaltim, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, persentasi siswa yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA menjadi 73,63% pada tahun 2023 yang dimana dalam kutipan artikel BeritaKaltim dikatakan mengalami penurunan. Jika hal ini tidak diperhatikan dengan serius maka akan menjadi permasalahan serius yang dapat menyebabkan menjadi banyak pengangguran dan juga menyebabkan banyaknya remaja atau peserta didik yang berpendidikan rendah. Namun, Pemerintah telah menyediakan untuk menampung siswa atau peserta didik yang mengalami putus sekolah di pendidikan formal yakni ialah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, dijelaskan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Kabupaten/Kota. SKB berfungsi sebagai lembaga pendidikan alternatif yang memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya siswa yang mengalami putus sekolah di pendidikan formal dan melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan. Oleh karena itulah penulis ingin mengetahui dan juga meneliti lebih dalam mengenai faktor apa saja yang menyebabkan remaja putus sekolah di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri 2 Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pendidikan

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, bahwa Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan juga pembelajaran siswa atau peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta kemampuan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Definisi dari pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap serta tingkah laku seseorang dalam usaha untuk mendewasakan manusia yang melalui pengajaran dan juga pelatihan.

Menurut (Amalia, 2020), Pendidikan merupakan suatu proses pendewasaan dalam berpikir, dalam arti lain pendidikan sering diartikan sebagai usaha seseorang atau individu untuk menumbuhkan kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Iswara dan Indrajaya dalam (Kumala & Lessy, 2023) Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam terbentuknya sebuah negara maju. Banyak peranan dan kontribusi pendidikan untuk negara yang sedang mengalami perkembangan, diantaranya pendidikan berfungsi sebagai wadah pembangunan karakter bagi suatu negara guna menunjukkan jati dirinya, semakin tinggi pendidikan maka dapat menurunkan jumlah angka kemiskinan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga dapat sebagai modal yang diharapkan manusia agar mampu meningkatkan derajat serta martabatnya.

Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang di dunia, pendidikan berusaha untuk mencerdaskan seluruh bangsa di dunia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada meningkatnya aspek-aspek kehidupan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini banyak sekali permasalahan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu banyak masyarakat yang putus sekolah. Sehingga sebagian masyarakat tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Meningkatnya tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya yang mewajibkan masyarakat harus memiliki pendidikan yang memadai, menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat yang kurang memiliki pendidikan tersebut. Khairunnisa & Ibn Khaldun Bogor (2023) (dalam Suhendro, 2019). Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu jenis pendidikan nonformal. Pendidikan kesetaraan memiliki dampak yang luas baik kepada individunya maupun kepada dunia pendidikan pada umumnya. Dampak yang dimaksud disini seperti memungkinkan semua pengetahuan, keahlian, serta keterampilan dapat dimanfaatkan secara maksimal serta mampu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Khairunnisa & Ibn

Khaldun Bogor (2023) (dalam Suhendro, 2019). Berdasarkan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B dan paket C. Menurut Khairunnisa & Ibn Khaldun Bogor (2023) dalam (Tohani, 2009) menyatakan bahwa atau pendidikan luar sekolah yang meliputi program Paket A yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), program paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan program paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 maka “pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Prinsip ini mengilhami seluruh pengampu dan perencana pendidikan untuk terus mendorong peran aktif lembaga pemerintah, swasta, dan usaha negara agar memberikan dukungan penuh penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat (Depdiknas, 2003).

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Pelatihan Kursus (LPK), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pondok Pesantren. Bahkan, mulai tahun 2008 telah dibuka kesempatan lembaga kursus/pelatihan dapat turut serta menyelenggarakan pendidikan kesetaraan khususnya untuk percepatan peningkatan keterampilan peserta didik. Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional lulusan pendidikan kesetaraan mempunyai hak eligibilitas untuk meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, serta memiliki pengakuan yang sama ketika mereka memasuki dunia kerja (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2010). Program pendidikan kesetaraan telah diakui secara hukum oleh pemerintah, Ijazah yang diterbitkan diakui sesuai dengan tingkat kesetaraan. Namun, orang sering meremehkan pendidikan kesetaraan. (Muchlisin et al., 2020).

Program Kesetaraan Paket A, B, dan C merupakan alternatif pendidikan bagi mereka yang telah melewati usia sekolah namun tetap ingin memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta ijazah yang setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Melalui program ini, peserta didik akan menerima materi pelajaran sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh. Proses pembelajarannya lebih fleksibel dibandingkan sekolah formal, karena hanya berlangsung tiga kali dalam seminggu, tidak setiap hari. Meski demikian, jenjang waktunya tetap sama dengan pendidikan formal: Paket A setara dengan pendidikan dasar selama enam tahun, Paket B setara dengan jenjang menengah pertama selama tiga tahun, dan Paket C setara dengan pendidikan menengah atas selama tiga tahun. Di akhir

program, peserta dapat mengikuti ujian kesetaraan atau dikenal juga sebagai ujian persamaan untuk memperoleh ijazah sebagai bukti kelulusan. Ijazah ini bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, seperti SMP, SMA, atau perguruan tinggi, serta dapat digunakan sebagai syarat dalam melamar pekerjaan.

Pendidikan kesetaraan mempunyai sasaran peserta didik yang spesifik, yaitu anak usia sekolah maupun dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal karena adanya lima hambatan, yaitu ekonomi, waktu, geografis, keyakinan, dan sosial/hukum. Hambatan ekonomi terjadi akibat kemiskinan di kalangan petani, nelayan, buruh, pekerja rumah tangga, tenaga kerja wanita, penduduk di daerah kumuh maupun penduduk miskin di daerah kota. Hambatan waktu karena pekerjaan mereka sebagai pengrajin, buruh, dan pekerja kasar lainnya. Hambatan geografis, seperti masyarakat suku terasing, etnik minoritas, masyarakat terisolir di kepulauan atau tengah hutan. Hambatan keyakinan, yaitu masyarakat pondok pesantren (salafiyah) yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Hambatan sosial/hukum seperti anak jalanan, anak lembaga pemasyarakatan, dan anak penyandang masalah sosial lainnya. Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan serta peraturan lainnya dalam kerangka peningkatan mutu lulusan untuk mandiri, kreatif, dan profesional. (Kintamani & Hermawan, 2012).

Putus Sekolah

Seseorang yang putus sekolah adalah orang yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah dan berhenti sebelum waktunya. Putus sekolah adalah saat seorang siswa harus berhenti belajar di sebuah lembaga pendidikan. Anak tidak mendapat pendidikan formal karena keluarga kurang ekonomi. (Kumala & Lessy, 2023)

Rahmad dalam (Utami & Rosyid, 2020) menyatakan putus sekolah adalah kondisi di mana seorang siswa terpaksa menghentikan pendidikan formalnya di sebuah lembaga pendidikan. Hal ini mengakibatkan anak kehilangan akses ke pendidikan formal, yang sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kesulitan ekonomi keluarga. Padahal, anak merupakan generasi penerus yang diharapkan melanjutkan cita-cita orang tua dan menjadi pilar masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terus menggalakkan program wajib belajar sebagai salah satu solusi utama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, serta kondisi remaja yang mengalami putus sekolah, sehingga menghasilkan pengalaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti. Sementara itu pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu lokasi tertentu, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri 2 Kota Samarinda, sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menampung warga belajar yang sebelumnya mengalami putus sekolah.

Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari warga belajar dan juga staff pengajar SKB Negeri 2 Samarinda, dengan jumlah 11 informan yang terbagi menjadi dua yakni informan utama yaitu warga belajar SKB Negeri 2 dan informan pendukung yaitu staff pengajar SKB Negeri 2 Samarinda. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi tentang profil Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 2 Kota Samarinda

Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Putus Sekolah

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyebab remaja putus sekolah di SKB Negeri 2 Kota Samarinda dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berkaitan dan sama-sama memberikan pengaruh terhadap keputusan remaja untuk tidak melanjutkan pendidikan formal.

Faktor internal meliputi aspek psikologis dan motivasi dari dalam diri siswa. Beberapa informan menyebutkan bahwa rasa malas, kurangnya minat terhadap kegiatan belajar, serta ketidakmampuan menjaga konsistensi belajar menjadi alasan mereka meninggalkan sekolah. Selain itu, terdapat pula kasus pelanggaran tata tertib sekolah, seperti terlibat skandal atau perilaku yang dianggap melanggar aturan sekolah, yang akhirnya membuat siswa dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya motivasi belajar dan permasalahan pribadi dapat menjadi hambatan serius dalam keberlangsungan pendidikan remaja.

Faktor eksternal juga muncul dengan dominasi yang cukup kuat. Kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan utama, di mana orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan seperti membayar uang SPP. Selain itu, terdapat kasus orang tua yang sakit atau memiliki pekerjaan tidak menetap di satu kota sehingga mengganggu stabilitas kehidupan anak. Faktor lingkungan sekolah pun turut berperan, seperti adanya perlakuan tidak adil dari kepala sekolah maupun guru, serta pengalaman perundungan dari teman sebaya. Situasi tersebut menciptakan ketidaknyamanan dalam belajar dan menurunkan semangat siswa untuk tetap bertahan di sekolah. Dengan demikian, faktor

internal seperti rendahnya motivasi dan permasalahan pribadi berpadu dengan faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama remaja memutuskan untuk berhenti dari pendidikan formal dan melanjutkan ke jalur pendidikan nonformal seperti SKB.

Pandangan Remaja Terhadap Pentingnya Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun para informan pernah mengalami putus sekolah, seluruhnya tetap memandang bahwa pendidikan memiliki arti penting bagi kehidupan mereka. Bagi seluruh informan, sekolah dianggap sebagai sarana utama untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sosial yang bermanfaat bagi masa depan. Pendidikan dipahami sebagai modal penting untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, memperbaiki taraf hidup, serta membuka kesempatan yang lebih luas di masyarakat. Pandangan positif terhadap sekolah ini muncul meskipun mereka menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi ekonomi, keluarga, maupun lingkungan sosial. Remaja menyadari bahwa tanpa pendidikan, mereka akan lebih sulit bersaing dalam dunia kerja dan rawan menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan diri. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan putus sekolah yang mereka ambil bukan disebabkan oleh anggapan bahwa pendidikan tidak penting, melainkan lebih karena kondisi yang memaksa dan di luar kendali mereka. Temuan ini juga menegaskan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah tertanam pada diri remaja, tetapi dukungan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan agar kesadaran tersebut dapat diwujudkan melalui keberlanjutan pendidikan. Dengan kata lain, pandangan remaja terhadap pentingnya sekolah tetap positif, namun perlu ditopang oleh sistem yang mampu memberikan akses dan kesempatan yang adil bagi semua remaja.

Kesimpulan

Fenomena remaja putus sekolah pada tingkat SMA disebabkan oleh berbagai faktor yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya minat dan motivasi belajar, rasa malas mengikuti kegiatan sekolah, serta masalah pribadi seperti keterlibatan dalam skandal atau pelanggaran yang menyebabkan siswa harus dikeluarkan atau memilih untuk keluar dari sekolah. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi keluarga yang lemah, orang tua yang menderita penyakit serius sehingga membutuhkan pendampingan anak, pekerjaan orang tua yang berpindah-pindah kota, serta lingkungan sekolah yang tidak kondusif, termasuk perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah dan perundungan dari teman sebaya.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja tetap memiliki pandangan positif terhadap pentingnya pendidikan.

Mereka menyadari bahwa sekolah merupakan jalan untuk memperbaiki masa depan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan meningkatkan taraf hidup. Sayangnya, kendala-kendala yang mereka hadapi membuat mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan di jalur formal, sehingga memilih mengikuti pendidikan nonformal seperti program kesetaraan di SKB. Putus sekolah tidak hanya berdampak pada terputusnya proses belajar, tetapi juga berpengaruh terhadap masa depan remaja, seperti rendahnya peluang kerja dan lemahnya daya saing individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dinas Pendidikan Kota Samarinda Dinas Pendidikan Kota Samarinda, agar dapat lebih responsif terhadap permasalahan pendidikan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi program bantuan pendidikan yakni beasiswa agar lebih tepat sasaran mengingat banyak sekali beasiswa yang tidak tepat sasaran. Hal ini penting agar tidak ada lagi siswa yang tidak mampu bersekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses dan kualitas pendidikan nonformal seperti SKB dengan mempercepat Pembangunan Gedung baru SKB agar fasilitas ruang kelas dan juga keterampilan lebih memadai dan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang lebih maksimal. Pendidikan nonformal harus diposisikan sebagai jalur pendidikan yang setara dan bermartabat, bukan sebagai pilihan terakhir. Pemerintah juga sebaiknya lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan serta opsi-opsi alternatif pendidikan yang tersedia bagi anak-anak yang mengalami kendala dalam mengikuti sekolah formal. Diharapkan juga untuk Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk meningkatkan pengawasan dan juga evaluasi terhadap lembaga pendidikan formal, khususnya terkait perilaku dan kebijakan kepala sekolah. Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa setiap kepala sekolah menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh siswa, tanpa adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminasi yang tidak berdasar. Sikap tidak adil dari kepala sekolah dapat berdampak negatif pada motivasi belajar siswa dan berpotensi menjadi salah satu penyebab putus sekolah, sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara penelitian ini. Di sisi lain, penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki sistem perlindungan psikologis bagi peserta didik. Dinas Pendidikan perlu mengawasi dan mengevaluasi keadaan sosial di sekolah-sekolah, termasuk memastikan tidak adanya diskriminasi, perundungan, atau

perlakuan tidak adil dari pihak guru maupun kepala sekolah. Pemerintah juga dapat mendorong hadirnya layanan konseling yang aktif dan berkualitas di setiap satuan pendidikan, agar siswa yang mengalami masalah pribadi memiliki tempat yang aman untuk berbicara dan mendapatkan solusi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka putus sekolah di Kota Samarinda dapat ditekan, dan setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak.

2. Kepada Pemerintah Kota Samarinda, khususnya instansi Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang berada di sekitar wilayah SKB Negeri 2 Samarinda, Salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan adalah dengan menginisiasi program sosialisasi remaja putus sekolah di setiap kelurahan atau RT yang berada dalam wilayah kecamatan, kemudian mengarahkan mereka untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C yang diselenggarakan oleh SKB. Upaya ini diharapkan dapat membantu menekan angka putus sekolah di Kota Samarinda, serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di jalur formal.
3. Kepada Masyarakat, khususnya lingkungan sekitar tempat tinggal remaja yang mengalami putus sekolah, disarankan untuk lebih peduli dan aktif dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak dan remaja di lingkungannya. Masyarakat memiliki peran sosial yang penting dalam menciptakan iklim yang mendorong anak untuk tetap sekolah, baik melalui motivasi, pengawasan sosial, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan pendidikan. Diperlukan kesadaran kolektif bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Sikap acuh, stigma terhadap anak putus sekolah, atau pembiaran terhadap remaja yang tidak lagi melanjutkan pendidikan, justru memperburuk kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu, masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan remaja putus sekolah kepada pihak kelurahan, RT/RW, atau SKB terdekat agar dapat diarahkan mengikuti program pendidikan kesetaraan. Selain itu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang turut mendorong remaja untuk kembali mengenyam pendidikan, memberikan dorongan moral, serta membantu menghapuskan stigma negatif terhadap jalur pendidikan nonformal seperti SKB. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, tercipta suasana sosial yang kondusif bagi remaja untuk bangkit dan melanjutkan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

4. Kepada Orang Tua atau Wali Remaja, disarankan untuk lebih memperhatikan dan mendampingi proses pendidikan anak secara aktif, baik dalam hal akademik maupun psikologis. Orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk pandangan anak terhadap pentingnya pendidikan serta dalam menjaga semangat mereka untuk terus bersekolah, terutama saat anak menghadapi hambatan belajar atau kesulitan dalam lingkungan sosialnya. Orang tua diharapkan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan materi pendidikan seperti perlengkapan sekolah, tetapi juga menunjukkan kepedulian secara emosional dan moral, seperti memberikan motivasi, membangun komunikasi terbuka, serta mendengarkan permasalahan yang dihadapi anak di sekolah. Selain itu, penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai tentang pentingnya pendidikan sejak dini agar anak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depannya. Bagi orang tua yang menghadapi keterbatasan ekonomi atau kondisi khusus, disarankan untuk tidak langsung mengambil keputusan memberhentikan anak dari sekolah, tetapi dapat mencari solusi alternatif seperti mengikuti program pendidikan kesetaraan (SKB), memanfaatkan beasiswa, atau berkonsultasi dengan pihak sekolah. Dengan dukungan yang berkelanjutan dari orang tua, anak akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk tetap melanjutkan pendidikannya meskipun dalam keterbatasan.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. (2020). Kreativitas Guru Pai Dalam Meningkatkan Kognitif Siswa (Studi Kualitatif Naturalistik Di SMP PGRI Cikarang Utara). 13, 73.
- Deswita, Y., & Nora, D. (2022). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 5(2), 257–266.
- Khairunnisa, A., & Ibn Khaldun Bogor, U. (2023). Peran Pendidikan Kesetaraan Dalam Lingkungan Masyarakat. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), Page.
- Kumala, R., & Lessy, Z. (2023). Analisis Hasil Asesmen dan Intervensi pada Remaja Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 32487–32502.
- Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1–13.
- Utami, W. N., & Rosyid, A. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Di Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Duri Kepa. *Jurnal Pendidikan Dasar*.